

PROSIDING SEMINAR NASIONAL

SEMANGAT HARI PATTIMURA DAN KEBANGKITAN NASIONAL UNTUK KEBHINEKAAN INDONESIA

Ambon, 18 Mei 2017

EDITOR :

Agust Ufie, S.Pd., M.Pd

Johan Pattiasina, S.Pd., MA

Samuel Patra Ritiauw, S.Pd., M.Pd



**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PATTIMURA
2017**

Sakitnya Melahirkan Nasionalisme (Maluku dalam Album Keindonesiaan)

Efilina Kissiya
(Dosen Prodi Sejarah FKIP Unpatti)

Pengantar

Tantangan disorganisasi sosial dan disintegrasi bangsa semakin kuat terasa ketika situasi konflik semakin meningkat dalam bentuk benturan sosial dengan aksi kekerasan yang bersifat brutal dan destruktif, disertai isu-isu konflik bermuatan SARA (Suku, Agama, Ras dan Antaragolongan). Bahkan sebelum masyarakat sembuh benar dari penyakit “budaya ketakutan” (*culture of fear*) dan “budaya terror” (*culture of terror*) yang menandai bahwa masyarakat sedang dilanda krisis multidimensional (Indroyanto 2001 ; 20, Negara yang telah berusaha merdeka lima puluh tujuh tahun ini harus dengan lapang dada melepaskan pulau Sipadan dan Ligitang. Di tengah situasi dan kondisi bangsa beserta elemen-elemen didalamnya yang semakin bertambah umur semakin kabur identitasnya, merosot segala dimensi kehidupannya, perlu kiranya slogan nasionalisme dipertanyakan kembali keefektifitasnya. *Quo vadis* nasionalisme Indonesia ? Mampukah nasionalisme menjadi perekat bangsa yang sedang berada di persimpangan jalan ini ?

Ketika kita memperbincangkan kembali konsep nasionalisme, terdapat fakta menarik tentang situasi dialogis tokoh-tokoh nasionalisme Indonesia Zaman Pergerakan. Pertama ialah polemik antara Soetatmo Soerjokusumoyang mengajurkan konsep nasionalisme Jawa kerana diilhami oleh latar belakang sejarah dan kebudayaan dengan dr. Ciptomongunkusumo yang mengintroduksir nasionalisme Hindia. Peristiwa ini terjadi pada tahun 1917. Kedua adalah polemik antara Ir. Soekarno dengan Haji Agus Salim tentang nasionalisme dan persatuan pada tahun 1928. Ia mengangkat nasionalisme yang dapat dimaknai sebagai chauvinistic. Setelah kedua polemik itu, selanjutnya telah menjadi tradisi intelektual bagi para pakar untuk mencoba mencari konsep nasionalisme ideal bagi bangsa Indonesia yang notabene adalah negara yang kaya ragam, baik etnis, bangsa, agama dan lain-lain.

Nasionalisme Indonesia memang masih merupakan “agama baru” kaum cendekiawan Indonesia awal abad sampai pertengahan abad ke dua puluh, seperti layaknya komunisme yang menjadi “agama baru” di Eropa abad ke Sembilan belas (Anderson, 2001 xvi). Dalam perkembangan, agama baru tersebut mulai disebarkan kepada masyarakat oleh

kaum cerdas pandai, motor penggerak revolusi pemikiran. dan ketika nasionalisme dimulai menyajikan sebuah definisi diri bahwa nasionalisme adalah kesetiaan warga negara kepada bangsanya (Selo Seomardjan, 2002) atau dengan kata lain suatu paham yang berpendapat bahwa kesetiaan tertinggi individu harus diserahkan kepada negara kebangsaan (Indiyanto, 2001: 5), atau juga menurut Hans Khun dalam bukunya Nasionalisme Arab, bahwa harga diri yang paling kecil (individu atau kelompok) diserahkan kepada harga diri yang paling besar yaitu negara, maka sejarah kerap kali membuktikan bahwa elit politik sering tidak menunjukkan keberpihakannya kepada bangsa dan negara, kepada rakyat, atau bahwa daerah-daerah seperti Timor-Timur, Aceh, dan Papua misalnya, yang semakin menampakkan kelunturan nasionalismenya, definisi paham kebangsaan ini sudah seharusnya tidak lagi dianggap sebagai hal yang final. Nasionalisme dan segala atribut penyebab serta akibat adanya harus dinamis. Nasionalisme harus sesuai dengan perubahan zaman, perubahan situasi dan kondisi bangsa itu sendiri.

Apakah Indonesia harus satu ? Apa yang memungkinkan kesatuan itu ? Apakah Indonesia harus terpisah-pisah dan membuat dirinya tidak lagi ada dan berada ? Pertanyaan-pertanyaan ini harus segera dicari jawabannya. Disinilah signifikansi ilmu sejarah, khususnya sejarah lokal diuji dalam pemberian solusi efektif dan efisien bagi problematika kekinian bangsa.

Memang sakit melahirkan nasionalisme, tidak mudah. Ketika dalam perkembangan dan perjalanan bangsa ini, terjadi begitu banyak persoalan-persoalan yang merujuk pada disintegrasi. Sungguh sangat disayangkan, negarapun hadir dengan ketidakadilan, pengembangan dan kesejahteraan yang dipusatkan hanya pada daerah Jawa, sementara elit-elit politik hanya berkutat dengan kepentingan masing-masing. Jangan salahkan, jika pada titik tertentu daerah-daerah di luar Jawa akan memisahkan diri dari yang namanya Indonesia.

Di mana rasa senasib dan sepenanggungan yang dulu di yel-yelkan bersama? Di mana kesadaran akan kesejarahan kita sebagai negara dan sebagai rakyat? Mengerlinglah sedikit ke belakang, Indonesia Tanpa Maluku bukanlah Indonesia. Di dalam tulisan ini akan sedikit disampaikan bagaimana Maluku di dalam album keindonesiaan sebagai contoh fenomena kecil daerah yang mungkin dapat menjadi referensi bagi pembangunan bangsa (*nation building*) di masa yang akan datang. Karena sejarah dianggap sebagai salah satu media pendewasaan pola pikir, penuntun kearah alam kebijaksanaan, sekurang-

kurangnya diharapkan penulisan sejarah lokal mampu menjadi cermin bagi pembangunan bangsa.

Maluku dalam Album Keindonesiaan

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal satu ayat satu disebutkan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Kasatuan. Cita-cita kesatuan pernah dikrarkan oleh para pemuda dalam peristiwa yang terkenal yaitu sumpah pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Kesatuan yang dimaksud mencakup satu tanah Indonesia, satu bangsa Indonesia dan satu bahasa Indonesia.

Setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 berdirilah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Selanjutnya pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) bersidang untuk mengisi segala perlengkapan Negara yang antara lain yang menyangkut Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tercantum tujuan Negara antara lain yaitu “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”. Istilah tumpah darah tersebut berarti seluruh wilayah bekas Hindia Belanda meliputi 8 (delapan) propinsi yaitu Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Borneo, Sulawesi, dan Maluku.

Maluku, termasuk Irian Barat, menjadi bagian dari wilayah Indonesia yang diproklamkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Sejak itu, baik orang Maluku maupun Irian Barat, merupakan bagian dari Negara bangsa yang diproklamkan itu. Kedudukan Irian Barat menurut rapat PPKI adalah bagian dari propinsi Maluku. Hal ini ditegaskan dalam pidato Sukarno pada 23 Agustus 1945 sebagai berikut “Bangsaku sekalian! Di Sumatera, di Jawa, di Borneo, Sulawesi, Kepulauan Sunda kecil, Maluku, dari Aceh sampai Merauke!”. Pidato Sukarno ini memperlihatkan bahwa Irian Barat sebagai keresidenan Nieuw Guinean sejak 1 April 1924 sudah di hapuskan dan digabungkan dengan keresidenan Ambon sehingga Irian Barat sendirinya menjadi *onderafdeeling* dari keresidenan Ambon.

Namun, kenyataannya, berita proklamasi tidak dapat diterima langsung dan dilaksanakan di kepulauan Indonesia Timur, termasuk Maluku dan Irian Barat. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain baik Maluku maupun Irian Barat mengalami kehadiran tentara sekutu lebih awal dan lebih cepat sehingga mempengaruhi perjalanan berita proklamasi di kedua wilayah ini. Faktor lain adalah geografis yang sangat berpengaruh hampir disebagian besar di wilayah Maluku dan Irian Barat. Walaupun

jumlah elit terdidik Maluku pada masa itu lebih banyak dari elit Irian Barat, namun Maluku merupakan wilayah yang terdiri dari 1.023 pulau-pulau besar dan kecil yang terbentang dari utara hingga selatan yang dipisahkan oleh lautan. Kondisi wilayah ini menyebabkan sulitnya hubungan antara satu tempat dengan tempat lainnya adalah terbatas sarana lain berupa media massa seperti radio dan surat kabar.

Sementara Irian Barat adalah wilayah daratan yang luas dengan beberapa pulau kecil disekitarnya, yang juga memiliki keterbatasan dan kesulitan sarana prasarana transportasi udara,, darat dan laut. Kondisi geografis wilayah Irian Barat yang sangat berat ini menyulitkan pula komunikasi antara-penduduk.Di samping itu, sangat terbatasnya kelompok elit asal Irian Barat yang terdidik mempengaruhi pemahaman orang di Irian Barat tentang Indonesia termasuk penyebaran proklamasi.

Gagasan Tentang Indonesia di Antara Masyarakat Maluku

Sekalipun telah terjadi kontak antar orang Maluku dengan wilayah lain di Indonesia, diperkirakan sejak abad-15, perjalanan orang Maluku baik di Utara, tengah maupun tenggara untuk menjadi bagian dari Indonesia diawali dengan kehadiran pemuda-pemuda Ambon yang mengikuti pendidikan di Jawa sejak 1890-an. Mereka melanjutkan kuliah di beberapa kota di tanah Jawa (Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Semarang dan Surabaya), di samping Sulawesi (Makassar dan Tando). Para pemuda asal Maluku yang lebih awal menginjak kakinya di Jawa antara lain Mr. Johannes Lutuhary, Ir. Marthinus Putuhena, Dr. Jacob Bernadus Sitanala, Dr. Melkianus Haulussy, Abdul Muthalib Sangaji, Wellem Johannes latumeten, Herman Pieters, F.M. Pupella, Dr. J. Kayadoe, Prof. Dr. Jonas Latumeten, Mohamad Padang, dan Sultan Musdafar Syah dari Ternate.

Sebagian pemuda-pemuda dari Maluku yang tinggal di berbagai tempat di Jawa dan Makassar pernah melanjutkan pendidikan Belanda di bidang kedokteran dan hukum yang kemudian kembali ke Jawa dan Ambon.Pertemuan dengan berbagai pemuda inilah yang menyebabkan mereka secara perlahan mulai melibatkan diri secara sukarela dalam kegiatan politik.

Pada tanggal 9 Mei 1920 Alexander Yacob Patty mendirikan Sarekat Ambon di Semarang.Tujuan organisasi ini adalah untuk memajukan kemakmuran penduduk Ambon.Melalui organisasi Sarekat Ambon, orang Maluku mulai pertama kali terlibat dalam organisasi politik dan memahami pentingnya nasionalisme. Organisasi ini

melibatkan intelektual Ambon yang terus tumbuh, dan cabang organisasi ini juga di buka beberapa kota besar di Jawa.

Alexander Yakob Patty lahir di desa Noloth pulau Saparua. Dia menamatkan pendidikan dasar di *Saparoemashe School* di kota Saparua dan melanjutkan pendidikannya di Surabaya, yaitu di Sekolah Kedokteran NIAS (Nederlandsch Indische Aartsens School). Namun, dalam perjalanan studinya, Alexander Yakob Patty dikeluarkan dari Sekolah Kedokteran dan pindah ke Semarang pada 1919. Dia menjadi wartawan seraya mendirikan perkumpulan Mena Muria dengan tujuan memajukan kesejahteraan masyarakat Ambon yang kemudian, pada tanggal 9 Mei 1920, mendirikan Sarekat Ambon. Di sinilah Alexander Yakob Patty mulai memperkenalkan dan memperluas ide nasionalisme Indonesia di antara orang Maluku.

Di Maluku ide-ide Sarekat Ambon mendapat dukungan dari kaum muda. Kedatangan Alexander Yakob Patty di Ambon 1923 di sambut para pemuda seperti E.U. Pupella, Wim Reawaru, D. Ayawaila, J. Tupamahu, J.D. Poetirai, L. Matulatuwa dan lainnya. Bersama dengan Alexander Yakob Patty, kelompok pemuda di Ambon melakukan propaganda ide-ide Sarekat Ambon untuk menanamkan benih-benih kebangsaan di wilayah sekitar Ambon dan sekitarnya. Alexander Yakob Patty mendatangi beberapa organisasi seperti Christelijk Ambonsch volksbond, Sou Molokoe, Inlands Leeraarsbond, Nusa Ina, Panji Naderland, Ambonsch Studiofond dan Ambon Raad. Organisasi-organisasi inilah yang sering dihubungi Alexander Yakob Patty untuk menyebarkan propaganda anti-Belanda.

Namun perjalanan Sarekat Ambon di Ambon mendapatkan tantangan. Di bawah pimpinan Residen Ambon, beberapa raja di Ambon ditugaskan untuk menghilangkan pengaruh Sarekat Ambon di Ambon. Raja-raja yang dianggap terlibat dalam organisasi ini diancam akan diberhentikan, dan banyak guru-guru yang diberhentikan dan dari jabatan, sementara ada yang dipindahkan dengan alasan tertentu. Oleh karena gerakan yang dilakukan A.Y. Patty ini dianggap sangat membahayakan pemerintah Belanda, maka Patty ditangkap dan diadili di Makassar pada tanggal 1924 dan kemudian diasingkan ke Boven Digul di Irian Barat.

Perjuangan Patty dilanjutkan oleh Mr. J. Latuharhary yang membawa Sarekat Ambon bersama organisasi politik lainnya di pulau Jawa untuk mencapai tujuan Indonesia merdeka. Sementara di Ambon, Sarekat Ambon tetap bertahan sekalipun mendapat

tantangan dari lawan politiknya *Regenten Bond* dan *Molukse Politiek Verbond*. Perjuangan terus dilakukan dengan mereorganisasi seperti dilakukan D. Ajawaila dengan bimbingan Mr. J. Latuharhary di Jawa, Setelah D. Ajawaila meninggal pada 27 Desember 1927, maka perjuangan ini terus dilanjutkan oleh E.U. Pupella yang juga seorang nasionalis dan dibantu oleh Ot Pattimaipau dan Wim Reawaru. Demikianlah sedikit dari wajah-wajah dan peristiwa yang terjadi di Maluku dalam Album keindonesiaan. Masih banyak lagi yang belum terurai dalam tulisan ini, dan akan diuraikan dalam kesempatan berikutnya.

Penutup

Setelah kita merdeka, kesadaran akan arti peranan sejarah untuk kelangsungan hidup kita sebagai bangsa Negara, tampak tetap berlanjut. Pengangkatan, sebagai pemberian penghargaan, tokoh-tokoh perlawanan terhadap kekuasaan VOC Pemerintah *Nederlandsch-Indie* dan tokoh perintis kemerdekaan dalam periode Pergerakan Nasional, telah dan tetap diberikan. Dalam rangka itu, Badan Pembina Pahlawan Pusat telah memberikan gelar “Pahlawan Nasional”, Perintis Kemerdekaan dan lain-lain, dan mereka itu berasal dari seluruh Indonesia. Diharapkan dengan itu “album wajah” kita tampak di dalam album ke-Indonesiaan kata. Pada sisi ini sejarah, baik dalam arti sejarah nasional, maupun dalam arti sejarah lokal, telah memberikan sumbangan integratifnya bagi bertegaknya bangsa Negara ini.

Di tengah-tengah “merebaknya” ide dan kegiatan yang bersifat etnosentrisme dewasa ini, kemungkinan album ke Indonesiaan yang memperlihatkan wajah-wajah kita bersama, dapat memberikan makna intergratifnya! jajahan wajah kita di dalam album ke Indonesiaan itu, juga memiliki makna bahwa katika kita menjadi Indonesia kita saling mengakui harga diri kita sebagai warga bangsa Negara dengan hak-hak dan kewajiban yang sama. Dengan itu, di dalam Indonesia, semua kami yang terdiri dari 500-an etnik itu, akan merasa nyaman berkumpul bersama di dalam symbol ke kitaan. Kita, Indonesia akan memberikan kehidupan bersama yang nyaman di dalam kebersamaan yang hidup makmur yang adil (Anhar Gonggong, 2002).

Berangkat dari pemikiran di atas, maka saya menyerahkan kembali kepada masing-masing penghuni ruang yang namanya Indonesia ini. Kembangkan saling mengakui

menghargai di dalam Indonesia dan untuk itu rumuskanlah secara cerdas etika untuk hari depan, dimana anda semua akan hidup bersama!

Daftar Pustaka

Kayam Umar, 2001. *Dalam Guru Bangsa*. Jakarta: Pusat Dokumentasi Politik, Jln Guntur No 49.

Giddens Anthoni, 2000. *Jalan Ketiga dan Kritik-Kritiknya*. Yogyakarta: IRCiSoD

Gonggong Anhar, 2002. *Hasrat Pengakuan diri. Presentasi Di Nasional Mahasiswa Se-Indonesia*.

Fogelman Edwin & William Ebenstein, 1985. *Isme-Isme Dewasa Ini*. Surabaya: Eirlangga.

Sekretarian Negara, 2013. *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*.

Direktorat Sejarah, 2015. *Sejarah Berita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia*. Jakarta: Direktorat Sejarah.

Meterai Bernarda, 2012. *Nasionalisme Ganda Orang Papua*. Jakarta: Kompas

Lubis Mochtar, 1977. *Manusia Indonesia*. Jakarta: Idayu Press.